

Pengetahuan Anggaran dan Efektivitas Partisipasi dalam Hubungannya dengan Kepuasan atas Pelaksanaan Anggaran Kinerja

Anton Ryadi & Suryo Pratolo*
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
*spratolo@yahoo.com

Abstract

This research aim to examine the relationship of society knowledge about APBD, participate effectiveness in compilation of budgetary and satisfaction of performance budgetary implementation. This research is motivated by performance budgeting system regulation. Eksogen variable in this research is budgeting knowledge, while effectiveness participates and satisfaction of performance budgeting implementation represent endogen variables. The data in this research consist of primarily taken from questionnaires spread about 180 ones and the technical sampling by using judgment sampling. Hypothesis of this research are examine by using the path analysis that develop from regression model. The result in this research shows that lower participate effectiveness is caused by lowering understanding of society about budgetary. Satisfaction of performance budgetary implementation variable isn't influenced by understanding of budgetary and participate effectiveness. The other alternative endogen variables are prosperity, good service and development equality.

Keywords: *Budgeting Knowledge, Participate Effectiveness, Judgment Sampling And Performance Budgeting Implementation.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur adanya pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pelaksanaan UU No. 17/2003 didukung dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut memperkuat pelaksanaan anggaran yang harus didasarkan pada pendekatan kinerja (*Performance Budgeting System*).

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya akuntabilitas publik sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran daerah. APBD berdasarkan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya mencapai hasil

kerja atau *output* dari rencana alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Faktor yang menuntut terciptanya pemerintahan yang baik muncul bersamaan dengan tingkat pengetahuan masyarakat dan juga perkembangan era globalisasi.

Anggaran pada sektor pemerintah memainkan sederet peran dalam pembangunan suatu negara. Secara teoritis anggaran pemerintah memainkan tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi, anggaran memainkan peran dalam pengalokasian untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintah yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan

pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan makro ekonomi yang kondusif (fungsi stabilitas). Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara (Deniey, 2006).

Tugas utama dari pemerintah daerah (pemda) adalah memberikan pelayanan kepada publik sehingga masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang layak. Pemda dituntut untuk menciptakan program dan kegiatan yang berorientasi kepada masyarakat, oleh karenanya dalam penyusunan anggaran sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat. Anggaran yang berkualitas selain melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya juga harus memenuhi prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien dan Efektivitas dan tata pemerintahan yang baik.

Pada kenyataannya proses penyusunan anggaran yang terjadi selama ini masih menggunakan pola-pola lama yaitu didominasi oleh eksekutif dan legislatif. Sementara pelibatan masyarakat masih sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali. Masyarakat sebenarnya memiliki hak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran untuk menuntut pemerintah supaya lebih terbuka dalam mengambil keputusan anggaran (Sopannah, 2007). Ketidakefektifan masyarakat dalam penyusunan anggaran menyebabkan kepentingan masyarakat menjadi berkurang dan bahkan diabaikan sehingga akan berpengaruh terhadap buruknya pelayanan yang diberikan pemda kepada masyarakat. Hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bukan hanya kalangan tertentu saja, maka dari itu kinerja pembangunan tanpa partisipasi masyarakat kurang optimal.

Penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD antara lain: *pertama*, tidak adanya sosialisasi dari pemda dan dari DPRD. *Kedua*, mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang ditempuh kurang efektif dan *ketiga*, ketidakpedulian

atau kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah yang disebabkan karena hanya sedikit Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (Sopannah, 2007).

Penelitian lain juga menemukan penyebab ketidakefektifan partisipasi masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan model partisipasi yang kurang sinergi. Model partisipasi tersebut dibedakan kedalam tiga versi yaitu pendekatan versi pemerintah, pendekatan versi organisasi masyarakat (ormas), dan pendekatan versi *stakeholder*. Ketiga model tersebut jika disinergikan maka akan menghasilkan proses perencanaan pembangunan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat (Sopannah dan Isa Wahyudi, 2005).

Pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBD akan menimbulkan suatu keselarasan tujuan antara pemda dengan masyarakat. Tugas pemda adalah melayani masyarakat, dan masyarakat menginginkan pelayanan yang layak sehingga lebih selaras apabila penyusunan anggaran dilakukan secara bersama. Pada kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah, sehingga peneliti ingin melakukan studi empiris untuk menemukan penyebab ketidakefektifan masyarakat dari sisi pengetahuan masyarakat tentang anggaran. Peneliti beranggapan bahwa masyarakat yang faham tentang anggaran akan sadar bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran serta ikut andil dalam proses penyusunannya.

Fenomena yang terjadi saat ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara teori yang diterapkan dengan praktek di lapangan. Banyak sekali masyarakat, mahasiswa dan ormas-ormas yang melakukan demonstrasi menuntut kejelasan anggaran. Hal tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap anggaran yang ditetapkan dan realisasinya.

Peneliti beranggapan bahwa permasalahan anggaran juga tidak luput dari adanya teori keagenan (*agency theory*) dalam pemerintahan yaitu antara eksekutif dengan

legislatif dan legislatif dengan masyarakat sebagai pemilih (*voter*). Masalah keagenan yang timbul di kalangan eksekutif adalah cenderung memaksimalkan utiliti (*self-interest*) karena memiliki keunggulan informasi, akibatnya eksekutif cenderung melakukan *budgetary slack*. Hal ini terjadi karena pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif dan masyarakat, namun demikian *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self-interest*) dibanding untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Gagaring, 2008).

Permasalahan diatas menimbulkan pertanyaan bagi peneliti tentang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Apabila masyarakat dilibatkan dalam penyusunan anggaran dan pendapat mereka juga dipertimbangkan, tentu saja anggaran yang disusun akan lebih memihak pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena yang terjadi ternyata jauh dari harapan masyarakat. Hal ini yang mendasari peneliti melakukan studi empiris untuk membuktikan pengaruh partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja dari sisi pengetahuan masyarakat tentang anggaran.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Definisi pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 884)

“Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).”.

Pengetahuan pada dasarnya adalah hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak (Indrianto dan Supomo, 1999 dalam Simsom et al, 2007). Pengetahuan juga merupakan suatu kepandaian yang dimiliki oleh individu terkait dengan sesuatu yang

dipelajarinya. Pengetahuan dan pengalamam yang tinggi akan menjadi dasar untuk memecahkan suatu permasalahan dengan mudah dan tepat. Oleh karena itu masyarakat yang berpartisipasi dalam penyusunan APBD sebaiknya memiliki pengetahuan tentang anggaran sehingga dalam bertindak untuk mengutarakan pendapat bisa lebih tepat. Pengetahuan tentang anggaran dapat membuka kemungkinan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan APBD, karena masyarakat menginginkan realisasi yang sesuai dengan harapannya.

H₁: Tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas partisipasinya dalam penyusunan anggaran.

Penjaringan aspirasi masyarakat yang biasanya disebut dengan ‘jaring asmara’ merupakan salah satu tahap perencanaan dan penting untuk dilakukan sebelum anggaran daerah ditetapkan. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah untuk menjamin agar arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat yang meliputi kebutuhan dan keinginan riil, dan bukan aspirasi yang berasal dari konspirasi politik (Abdul Halim, 2002: 249).

Tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Keberhasilan ini tidak cukup apabila hanya sampai pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan namun juga kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya, maka pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat (Haryanto, 2005: 83).

United Nation Development Program (UNDP) memberikan beberapa karakteristik dalam pelaksanaan *good governance*

diantaranya adanya *participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (LAN & BPKP, 2000 dalam Suryo, 2002).

H₂: Efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Kepuasan dapat dipahami melalui beberapa aspek yaitu: (1) kepuasan merupakan suatu bentuk respon atas suatu pekerjaan, (2) kepuasan sering ditentukan oleh hasil pekerjaan atau kinerja, (3) kepuasan terkait dengan sikap yang dirasakan oleh setiap individu atas sesuatu {Luthans, (2006) dalam Celcila & gudono, (2007)}. Pemahaman masyarakat terhadap anggaran mempermudah dalam menilai kinerja pemda dalam menyusun anggaran, sehingga masyarakat dapat menilai kepuasannya atas pelaksanaan anggaran kinerja. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kinerja pemda harus bisa dirasakan baik, sehingga kepuasan masyarakat atas kinerja pemda dapat meningkat.

Pengetahuan tentang APBD merupakan suatu hal penting bagi masyarakat. Hal ini dapat memicu masyarakat untuk bisa memahami secara mendalam kegiatan yang dilakukan oleh pemda dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pengetahuan tentang anggaran juga bisa memberikan suatu motivasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola dana publik. Masyarakat dapat menilai kinerja pemda dengan melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat akan merasa puas apabila kinerja pemda telah memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan harapan.

H₃: Tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Masyarakat yang paham tentang anggaran dan mengetahui dampak dari realisasi suatu anggaran, akan lebih baik jika ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu, pemahaman yang tinggi dapat mempengaruhi keefektifan masyarakat untuk ikut andil dalam penyusunan anggaran. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi melalui mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dengan maksud melakukan *validasi* terhadap jabatan Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) yang dituangkan dalam rumusan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan teknik penjangkaran kepada elemen-elemen masyarakat di Daerah, antara lain meliputi: Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Asosiasi Profesi dan Perguruan Tinggi. Hasil penjangkaran aspirasi tersebut selanjutnya dapat dituangkan kedalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD (A.G Subarsono, 2005: 31).

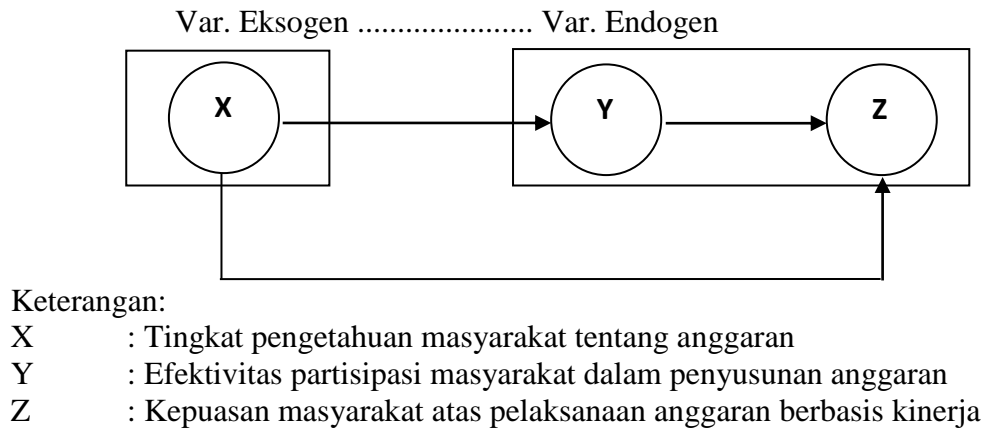
Penerapan anggaran berbasis kinerja diterapkan seiring dengan adanya Otonomi Daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Hadriyanus, 2005:2). Prinsip-prinsip tersebut akan membawa masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, oleh karena itu masyarakat harus mengerti tata cara pelaksanaan program pemerintah dalam melayani masyarakat, sehingga sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi faktor penting agar masyarakat mampu memberikan kontribusi yang baik dalam partisipasinya.

H₄: Pengetahuan masyarakat tentang anggaran mempengaruhi kepuasan masyarakat atas penerapan anggaran berbasis kinerja melalui variabel Efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran.

METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Dari beberapa ringkasan penjelasan landasan teori diatas maka model penelitian diilustrasikan seperti pada gambar 1 (Ali Hasymi, 2008):



Gambar 1. Model Penelitian

Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel

Kabupaten Bantul adalah daerah yang menjadi objek penelitian dan sebagai subjek penelitiannya adalah masyarakat di Kabupaten Bantul. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, sehingga peneliti menggunakan kuesioner dan dikirimkan kepada responden sejumlah 180 eksemplar. Sampel yang digunakan dalam penelitian diambil dengan menggunakan metode *judgement sampling* yaitu pengambilan sampel yang sesuai dengan pertimbangan peneliti. Masyarakat yang berada di Kabupaten Bantul-Yogyakarta merupakan populasi dalam penelitian. Peneliti membagi masyarakat kedalam tiga kelompok sebagai sampel sekaligus responden yaitu petani, mahasiswa dan guru yang bekerja, berkependudukan dan berdomisili di daerah tersebut.

Pemilihan sampel dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya: (1) peneliti beranggapan bahwa mereka mengerti tentang anggaran, (2) ketiga kelompok masyarakat tersebut merasakan dampak dari realisasi anggaran daerah, sehingga peneliti dapat menilai kepuasan masyarakat atas

pelaksanaan APBD kinerja, dan (3) kelompok masyarakat tersebut memiliki hak untuk memberikan aspirasi/ berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.

Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Terdapat dua jenis variabel yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel pengetahuan anggaran merupakan variabel eksogen karena tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model penelitian. Variabel efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja merupakan variabel endogen karena dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap responden atas pertanyaan-pertanyaan dengan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan skor 5 (Sangat Setuju), 4 (Setuju), 3 (Netral), 2 (Tidak Setuju) dan 1 (Sangat Tidak Setuju).

Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan meregresi antar model. Hipotesis kesatu diregresi dengan model pertama yaitu variabel pengetahuan anggaran terhadap

efektivitas partisipasi. Hipotesis kedua dan ketiga diuji dengan model kedua yaitu meregresi variabel pengetahuan anggaran dan efektivitas partisipasi terhadap kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Hipotesis keempat diuji dengan metoda lengkap dengan efektivitas partisipasi sebagai variabel intervening.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Variabel yang dipakai dalam penelitian dikatakan valid apabila memiliki nilai *loading faktor* $> 0,4$ (Tashadi, 2007). Hasil pengujian validitas variabel pengetahuan anggaran menunjukkan bahwa dari 12 item pertanyaan terdapat satu pertanyaan yang tidak valid yaitu pada poin ke-12 sedangkan hasil uji validitas pada variabel efektivitas partisipasi menunjukkan bahwa dari 11 item pertanyaan terdapat beberapa yang tidak valid yaitu pada poin pertanyaan 4, 7 dan 9. Pengujian validitas variabel kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja menunjukkan bahwa dari 10 item pertanyaan terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid yaitu pada poin 3, 4, 6 dan 8. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak diikuti sertakan pada analisis data selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian adalah reliabel. Hal ini terlihat jelas pada besarnya nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel yaitu $> 0,6$ sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian (Nunnali, 1978 dalam Tashadi 2007).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian dilakukan untuk melihat apakah model regresi variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji

normalitas dalam penelitian menggunakan grafik normal *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* (Nazaruddin, 2006). Grafik normal plot pada uji normalitas menunjukkan arah dan penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Grafik tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah model regresi antar variabel bebas saling berkorelasi. Terdapat dua model regresi dalam penelitian sehingga peneliti melakukan pengujian untuk setiap modelnya. Peneliti mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yaitu dengan melihat nilai VIF pada output hasil pengujian. Output hasil pengujian multikolinieritas untuk model regresi pertama menunjukkan nilai VIF sebesar $1,0 < 10$ sedangkan nilai VIF model regresi kedua masing-masing variabel sebesar $1,567 < 10$ hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas masing-masing model dilakukan dengan uji *glejser*. Jika nilai signifikansi lebih dari taraf keyakinan 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hasil pengujian model pertama menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,754 sedangkan untuk model kedua masing-masing 0,140 dan 0,889 $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian tidak mengandung heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis Kesatu

Hasil pengolahan data dalam melakukan uji hipotesis pertama ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1
Uji t Statistik

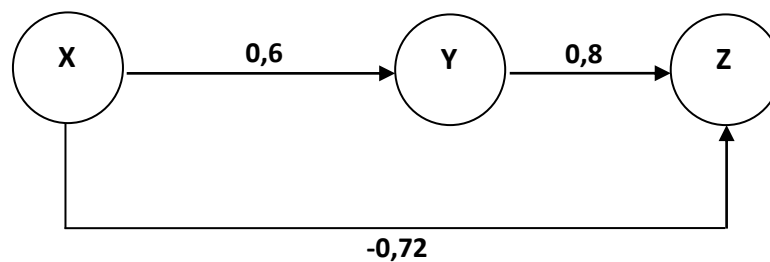
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,620	2,245		3,840	,000

Nilai t-hitung variabel pengetahuan anggaran adalah 6,734 dengan nilai *coefficients beta* 0,601 dan P-value 0,000 < alpha 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang anggaran berpengaruh secara positif signifikan terhadap Efektivitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas partisipasi yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang rendah.

Hasil penelitian mencerminkan kondisi yang ada saat ini dimana pelibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran kurang optimal. Kondisi tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor sosialisasi yang kurang efektif dari pemda, sehingga pemahaman masyarakat tentang anggaran dan adanya hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran belum bisa terlaksana dengan baik. Faktor lain yang dapat mempengaruhi rendahnya Efektivitas partisipasi adalah rasa kepedulian masyarakat yang rendah terhadap anggaran.

Tabel 2
Uji t Statistik

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24,279	2,310		10,512	,000
Jumlah PA	,046	,077	,084	,599	,551
Jumlah EP	-,054	,106	-,072	-,510	,611



Keterangan:

X: Pengetahuan Anggaran

Y: Efektivitas Partisipasi

Z: Kepuasan atas Pelaksanaan Anggaran Kinerja

Gambar 2. Hubungan Variabel Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Kepuasan atas Pelaksanaan Anggaran Kinerja

Hipotesis Kedua dan Ketiga

Hasil pengujian hipotesis kedua dan ketiga ditampilkan pada tabel 2. Output uji t

statistik untuk variabel pengetahuan anggaran dan Efektivitas partisipasi ternyata tidak signifikan karena nilai sig > alpha

(5%), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja. Hasil pengujian hipotesis kedua dan ketiga tidak menunjukkan nilai yang signifikan, sehingga hipotesis tidak dapat diterima, artinya pengetahuan anggaran dan Efektivitas partisipasi tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja. Peneliti berasumsi bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja, misalnya kesejahteraan, pelayanan dan pemerataan pembangunan.

Hipotesis Keempat

Hasil dari pengolahan data atas pengujian hipotesis tampak pada gambar 2. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa *intervening variable* tidak terjadi, maka hipotesis (H_4) tidak dapat diterima. Peneliti beranggapan bahwa kondisi tersebut terjadi karena dalam penyusunan anggaran masih didominasi oleh para eksekutif dan legislatif, sehingga peran masyarakat masih terabaikan. Anggaran yang disusun berdasarkan kinerja telah mengajarkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyusunan anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran, namun hal tersebut tidak terbukti dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas partisipasi dan pemahaman terhadap anggaran tidak mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran kinerja.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran masih rendah, kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anggaran, sehingga proses penyusunan anggaran diserahkan

sepenuhnya kepada pemda. Kedua, pengetahuan anggaran dan Efektivitas partisipasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja. Peneliti beranggapan bahwa kepuasan tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor lain misalnya kesejahteraan, pelayanan dan pemerataan pembangunan. Ketiga, pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel pengetahuan anggaran dan Efektivitas partisipasi ternyata tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Peneliti berasumsi bahwa kondisi tersebut terjadi karena anggaran masih disusun dengan didominasi oleh eksekutif dan legislatif dan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan masyarakat sehingga kepuasan terhadap pelaksanaan anggaran kinerja masih rendah. Hal tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran kinerja masih belum efektif.

Keterbatasan

Selama berlangsungnya penelitian, peneliti menemukan beberapa kendala diantaranya: pertama, variabel dalam penelitian diukur dengan menggunakan persepsi dari responden (kuesioner), sehingga ada kemungkinan terjadi bias. Kedua, kuesioner yang diberikan kepada responden belum dilengkapi dengan penjelasan secara lisan. Ketiga, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 180 eksemplar dengan data responden yang dapat diolah sebanyak 82 kuesioner. Keempat, penelitian dilakukan di daerah bantul, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir secara keseluruhan. Terakhir, diduga masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi Efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: pertama, peneliti sebaiknya memberikan penjelasan mengenai maksud, isi dan tujuan kuesioner sehingga dapat diperoleh jawaban yang representatif. Kedua, memperbanyak jumlah penyebaran kuesioner untuk menghindari minimnya jumlah kuesioner yang dapat diolah. Ketiga,

memperluas objek penelitian sehingga hasil penelitaian dapat digeneralisasi. Terakhir, pertimbangkan banyak hal yang bisa menjadi variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap Efektivitas partisipasi dan kepuasan atas pelaksanaan anggaran kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2002. *Akuntabilitas dan Pengendalian Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta 2002
- A.G Subarsono, 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja konsep dan Aplikasinya (Arah Kebijakan Umum)*, Magister Administrasi Publik UGM dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)
- Ali Hasymi, 2008. *Statistik Dasar*, Materi Perkuliahan Statistik Dasar STAIN Pontianak, <http://www.yahoo.com> Jumat 29 Mei 2008 pukul 13.00 WIB.
- Celcilia E. dan Gudono, 2007. *Pengaruh Kompleksitas Tugas dan Lokus Of Control terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja auditor*, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X. Tanggal 26-28 Juli 2007. Makasar
- Deniey Adi Purwanto, 2006. *Disorientasi Anggaran dalam Pembangunan Nasional*, <http://www.ekofeum.or.id/artikel>. Kamis 29 Mei 2008 pukul 12.05 WIB.
- Gagaring Pagalung, 24 Februari 2008. *Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah*, Swadaya MANDIRI. <http://www.google.com> Senin 16 Juni 2008 pukul 13.00 WIB.
- Hadriyanus Suharyanto, 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja konsep dan Aplikasinya (Konsep Anggaran Kinerja)*, Magister Administrasi Publik UGM dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) 2005
- Haryanto, 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja konsep dan Aplikasinya (Aspirasi Masyarakat dan Anggaran)*, Magister Administrasi Publik UGM dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) 2005
- Iejte Nazaruudin, 2006. *Modul Praktikum statistika*, Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi UMY 2006
- Imam Ghozali, 2005. *Model Persaman Striktural*, Universitas Diponegoro 2005
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1996
- Simson et al, 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antar Pengetahuan Dewan Tentang Anggarn dengan Pengawasan Keuangan daerah (APBD)*, Proceeding Simposium Nasional Akuntansi X. Tanggal 26-28 Juli 2007. Makasar
- Sopannah, 2007. *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Berperspektif Gender*, Proceeding Konferensi Penelitian Akuntansi Sektor Publik. Tanggal 25-26 November 2007. Surabaya
- Sopannah dan Isa Wahyudi, 2005. *Starategi Penguatam Masyarakat Sipil dalam Meminimalisasi Distorsi Penyusunan APBD*, Proceeding Simposium Riset Ekonomi II. Tanggal 23-24 November 2005. Surabaya
- Suryo Pratolo, 2002. *Partisipasi Pembuatan Anggaran dan Kinerja Manajerial: Tinjauan Unsur "Kepublikan" Sebagai Variabel Pemoderasi*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Volume 3 No. 1 Januari 2002
- Tashadi Tarmizi, 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, Tesis Program Magister Sains Akuntansi